



Rekonstruksi Tata Kelola Fiskal Berbasis Syariah: Analisis Peran Strategis Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah

Susan Kurniati¹

*Korespondensi :

Email :

susankurniati330@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 11 September 2025

Revisi : 20 November 2025

Diterima : 05 Desember 2025

Diterbitkan : 10 Desember 2025

Kata Kunci :

Tata Kelola Keuangan Daerah,
Governansi Syariah, Ekonomi
Pembangunan Islam

Keyword :

Regional Fiscal Governance ,
Shariah Governance , Islamic
Development Economics

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas tata kelola fiskal, terutama pada wilayah yang menerapkan kerangka hukum berbasis syariah seperti Aceh. Penelitian ini menganalisis peran strategis Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pembangunan. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana sekretariat menjalankan prosedur administratif, mengelola dokumentasi keuangan, serta memastikan kepatuhan dalam siklus anggaran daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi bersistem, telaah dokumen anggaran, dan analisis regulasi terkait pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretariat berperan penting dalam koordinasi perencanaan anggaran, fasilitasi pembahasan legislatif–eksekutif, serta penjaminan integritas pelaporan keuangan. Meskipun demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan, seperti panjangnya rantai birokrasi, keterbatasan teknologi, serta variasi kompetensi aparatur. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola yang selaras dengan prinsip maqasid al-shariah, terutama nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi administrasi, dan penguatan transparansi menjadi langkah penting menuju tata kelola fiskal daerah yang lebih efektif dan beretika.

Regional financial governance in Indonesia continues to face structural and administrative challenges that influence the effectiveness of fiscal management, particularly in regions operating under Islamic legal frameworks such as Aceh. This study examines the strategic role of the Secretariat of the South Aceh District People's Representative Council (DPRK) in supporting transparent, accountable, and development-oriented fiscal governance. The research aims to explore how the Secretariat institutionalizes administrative procedures, maintains financial documentation, and ensures compliance within the local budget cycle. Employing a qualitative descriptive method, data were collected through systematic observation, review of financial documents, and analysis of regulatory frameworks governing regional public finance. The findings reveal that the Secretariat plays a pivotal role in coordinating budget planning, facilitating legislative–executive deliberations, and maintaining the integrity of financial reporting. However, the study also identifies persistent constraints, including bureaucratic layers, limited technological integration, and varying levels of administrative competence. From the perspective of Islamic development economics, these challenges highlight the need for governance improvements aligned with maqasid al-shariah principles emphasizing justice, accountability, and public welfare. The study concludes that strengthening institutional capacity, digitalization, and transparency mechanisms is essential for achieving more effective and ethical regional fiscal governance.

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan daerah merupakan instrumen fundamental dalam membangun pemerintahan yang efektif, berorientasi pembangunan, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam perspektif Ekonomi Pembangunan Islam, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif yang bersifat teknokratis, tetapi juga sebagai amanah moral untuk mewujudkan *maslahah ‘ammah*, memastikan distribusi manfaat pembangunan, dan menjaga keadilan fiskal. Prinsip maqasid al-shariah, terutama hifz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan distributif, menempatkan tata kelola fiskal sebagai salah satu faktor kunci bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Al-Khatib & Abdullah, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang yang signifikan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanjanya. Kewenangan ini menuntut kemampuan institusi daerah dalam mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan berorientasi pembangunan. Provinsi Aceh sebagai daerah dengan kekhususan regulasi, memiliki keunikan tersendiri karena pelaksanaan tata kelola pemerintahannya berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini menjadikan integrasi nilai Islam ke dalam mekanisme keuangan daerah bukan hanya aspek normatif, tetapi juga operasional (Mardiasmo, 2021).

Sekretariat DPRK Aceh Selatan memiliki posisi strategis dalam sistem tata kelola fiskal daerah. Sebagai perangkat pendukung lembaga legislatif, sekretariat memiliki peran sentral dalam proses penyusunan anggaran, pengawasan, dokumentasi keuangan, dan penyediaan dukungan administratif terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPRK. Naskah asli yang Anda unggah menunjukkan bahwa sekretariat terlibat dalam penyusunan APBK, pengelolaan dokumen anggaran, proses pencairan anggaran, serta pengawasan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (Al-Khatib & Abdullah, 2023).

Fungsi ini menjadikan sekretariat bukan hanya unit administratif, tetapi juga aktor kunci dalam mengamankan integritas fiskal daerah. Sejumlah penelitian internasional menyoroti pentingnya memperkuat peran lembaga administratif pendukung legislatif dalam mendorong tata kelola keuangan publik yang transparan. Menurut Rahman & Rosman (2022, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*), keberhasilan tata kelola fiskal bergantung pada kualitas manajemen internal lembaga legislatif dan unit administratif pendukungnya. Studi yang sama menekankan bahwa integrasi nilai Islam—khususnya prinsip amanah, keadilan, dan transparansi—dapat memperkuat mekanisme pengawasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sekretariat DPRK memiliki kontribusi signifikan dalam memastikan proses fiskal berjalan sesuai nilai tata kelola syariah (Rahman & Rosman, 2022).

Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep syariah governance menjadi landasan normatif yang memandu tata kelola fiskal. *Governance syariah*

menekankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran. Literturnya telah berkembang luas dalam konteks keuangan syariah, namun penerapannya pada tata kelola pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji tata kelola keuangan daerah berbasis nilai Islam dalam konteks Aceh Selatan (Chapra, 2008).

Konsep hisbah, yang dalam sejarah Islam berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik, memberikan kerangka penting bagi pengawasan anggaran modern. Hisbah menekankan kewajiban negara untuk menjaga hak masyarakat dan mencegah penyalahgunaan sumber daya publik. El-Khatib & Abdullah (2023, Review of Islamic Economics) menyatakan bahwa hisbah dapat dimodernisasi melalui mekanisme audit internal, pelaporan transparan, dan akses publik terhadap dokumen anggaran. Dengan demikian, sekretariat DPRK dapat dipahami sebagai bagian dari struktur hisbah governance dalam pemerintahan daerah (Al-Khatib & Abdullah, 2023).

Kerangka teoritik lain yang relevan adalah konsep keuangan publik menurut Ibn Khaldun, yang menegaskan bahwa kekuatan negara sangat dipengaruhi oleh tata kelola fiskal. Menurut Ibn Khaldun, *“pajak yang adil meningkatkan produksi dan stabilitas, sementara pajak yang berat serta birokrasi yang tidak efisien melemahkan negara.”* Prinsip ini sangat relevan dalam menganalisis tantangan birokrasi dan proses anggaran yang panjang yang disebutkan dalam dokumen asli penelitian (Khaldun, 2014).

Efisiensi birokrasi menjadi prasyarat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Studi kontemporer dalam ekonomi pembangunan Islam mengembangkan teori tentang hubungan antara tata kelola fiskal, pembangunan, dan nilai syariah. Menurut Mansur & Ali (2021, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies), tata kelola fiskal yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas distribusi anggaran pembangunan dan memperkuat partisipasi masyarakat. Aceh sebagai daerah bersyariah memiliki kelebihan struktural untuk mengadaptasi teori ini dalam praktik (Saputri et al., 2025; Uddin et al., 2020)

Melihat konteks tersebut, Sekretariat DPRK Aceh Selatan berada pada titik strategis dalam siklus anggaran daerah. Fungsi sekretariat mencakup: penyusunan dokumen perencanaan anggaran, asiliasi pembahasan RAPBK antara legislatif dan eksekutif, engelolaan dokumen pertanggungjawaban, emantauan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan pendukung fungsi pengawasan DPRK, serta penyimpanan arsip keuangan sebagai bukti hukum dan administratif (Syarifah & Nabhan, 2022; Uddin et al., 2020)

Seluruh fungsi tersebut merupakan bagian dari proses economic governance yang menentukan baik-buruknya kualitas keuangan daerah. Jika tata kelola berjalan baik, anggaran dapat berperan sebagai instrumen

pembangunan. Sebaliknya, jika tata kelola lemah, anggaran menjadi sumber inefisiensi dan potensi penyimpangan.

Dalam dokumen asli, disebutkan pula bahwa tantangan yang muncul mencakup keterbatasan regulasi, keterlambatan prosedur birokrasi, kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan teknologi dalam administrasi keuangan daerah

Tantangan ini bukanlah fenomena tunggal di Aceh Selatan, melainkan bagian dari persoalan struktural yang banyak ditemukan pada lembaga pemerintahan daerah di Indonesia. Literatur Scopus mencatat bahwa kapasitas birokrasi merupakan salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan daerah (Siddiqui, 2020, *Public Administration and Development*). Keterbatasan kapasitas menghambat efektivitas tata kelola fiskal dan berdampak langsung pada pelayanan publik (Shanker et al., 2020)

Dalam konteks Aceh Selatan, urgensi untuk memperbaiki tata kelola keuangan menjadi lebih besar karena adanya tuntutan moral dan sosial dari masyarakat terhadap penerapan syariah dalam kehidupan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif administrasi publik modern dengan paradigma ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam tata kelola keuangan daerah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip Ekonomi Pembangunan Islam (Dewi et al., 2023; Putri, 2020) Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses, struktur, dan dinamika kelembagaan secara mendalam serta memungkinkan peneliti menilai praktik tata kelola fiskal dalam konteks normatif syariah. Desain penelitian bersifat eksploratif-deskriptif, berfokus pada proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Lokasi penelitian berada pada Sekretariat DPRK Aceh Selatan, yang memiliki fungsi strategis sebagai unit administratif penyokong pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan fiskal (Daus et al., 2025; Tanjung et al., 2025)

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari:

Data primer, diperoleh melalui observasi terhadap proses administrasi keuangan, mekanisme koordinasi internal, serta alur pengelolaan dokumen (Asyari, 2017; Nahlah et al., 2023)

Data sekunder, berasal dari regulasi terkait keuangan daerah, struktur organisasi, serta dokumen administrasi keuangan yang relevan

Teknik pengumpulan data meliputi observasi bersistem, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Observasi digunakan untuk memahami praktik administratif secara langsung, sedangkan dokumentasi memberikan gambaran empiris

mengenai proses anggaran. Studi literatur mendukung penyusunan kerangka teoritik berbasis maqasid al-shariah, hisbah, dan teori fiskal Ibn Khaldun.

Analisis Data

Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Kerangka analisis ekonomi Islam digunakan untuk menilai dimensi hifz al-mal, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Fungsi Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretariat DPRK Aceh Selatan menempati posisi struktural yang sangat strategis dalam sistem keuangan daerah. Sebagai tulang punggung administrasi legislatif, sekretariat menjalankan fungsi koordinatif, dokumentatif, dan fasilitatif yang memastikan seluruh rangkaian siklus anggaran dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah, sekretariat berfungsi sebagai simpul administratif yang menghubungkan kepentingan legislatif, eksekutif, serta aspek kepatuhan regulatif yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Peran ini memberikan fondasi bagi terbangunnya sistem fiskal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pembangunan (Rosihana et al., 2024)

Struktur internal sekretariat umumnya terdiri dari beberapa bagian, seperti bagian umum, bagian persidangan, bagian hukum, dan terutama bagian keuangan yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan dokumen anggaran. Fungsi ini mencakup penyusunan administrasi pendukung pembahasan anggaran, pemrosesan dokumen hasil persetujuan anggaran, pengelolaan arsip keuangan, serta penyajian informasi fiskal bagi DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Posisi strategis sekretariat memungkinkan lembaga legislatif bekerja secara efektif karena setiap proses formal, baik terkait persidangan maupun administrasi keuangan, membutuhkan dukungan sekretariat yang kompeten (Diana, 2021)

Penelitian ini juga menemukan bahwa sekretariat memainkan peranan penting dalam menjaga integritas proses anggaran. Transparansi dan akurasi dokumen anggaran sangat bergantung pada kemampuan sekretariat mengelola proses administrasi secara disiplin. Kejelasan alur verifikasi, ketertiban pengarsipan, serta konsistensi dokumentasi menjadi landasan dalam menjamin kepastian hukum penggunaan anggaran daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah yang kompleks, sekretariat dapat dianggap sebagai *institutional safeguard* yang menjamin tercapainya tata kelola fiskal yang baik.

Secara konseptual, struktur sekretariat memiliki hubungan erat dengan teori tata kelola publik modern. Menurut literatur administrasi publik, lembaga pendukung legislatif harus mampu memastikan bahwa proses penganggaran berjalan melalui mekanisme checks and balances yang kuat. Fungsi sekretariat dalam hal ini bukan sekadar administratif; ia merupakan salah satu komponen governance yang menentukan kualitas keputusan anggaran. Peran ini sejalan dengan prinsip syariah governance yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan transparansi, dan menjaga amanah pengelolaan dana publik.

Efektivitas Proses Administrasi Keuangan Daerah

Efektivitas proses administrasi keuangan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola fiskal daerah. Proses ini meliputi beberapa tahap utama: perencanaan anggaran, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretariat DPRK Aceh Selatan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan tersebut, khususnya dalam aspek dokumentasi, verifikasi administratif, dan fasilitasi koordinasi antarlembaga.

Pada tahap perencanaan, sekretariat berperan dalam menyiapkan dokumen pendukung pembahasan rencana anggaran. Keakuratan dokumen perencanaan sangat penting karena menjadi dasar bagi proses pembahasan RAPBK antara legislatif dan eksekutif. Efektivitas pada tahap ini tercermin dari ketepatan waktu penyusunan dokumen, kesesuaian format dengan ketentuan peraturan, serta kelengkapan informasi yang disajikan.

Pada tahap pembahasan anggaran, sekretariat menjalankan peran fasilitatif penting yang memastikan proses dialog antara legislatif dan eksekutif berjalan tertib dan terdokumentasikan. Notulensi rapat, penyimpanan arsip pembahasan, serta penyusunan berita acara menjadi aspek krusial yang mendukung legitimasi keputusan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sekretariat tidak hanya berperan administratif, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga integritas proses politik anggaran.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, sekretariat menerima dan mencatat laporan penggunaan anggaran dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan DPRK. Akurasi pencatatan serta ketepatan verifikasi menjadi elemen kunci dalam memastikan kesesuaian anggaran dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, sekretariat bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen administratif yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta arsip pendukung lainnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa sekretariat DPRK Aceh Selatan telah membangun mekanisme administrasi yang relatif tertib, meskipun masih terdapat

kebutuhan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi dan integrasi sistem informasi keuangan daerah.

Efektivitas ini dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi Islam. Prinsip efisiensi administrasi merupakan bagian dari nilai itqan (ketekunan dan kesempurnaan kerja), sedangkan akurasi pelaporan mencerminkan prinsip amanah (kepercayaan). Kedua nilai tersebut sangat relevan sebagai dasar penilaian kualitas administrasi fiskal dalam pemerintahan daerah.

Tantangan rokrasi dan Kapasitas Aparatur

Meskipun struktur dan prosedur administrasi sekretariat telah berjalan, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi kualitas tata kelola keuangan daerah.

1. Keterbatasan Kapasitas SDM

Kapasitas sumber daya manusia dalam memahami regulasi keuangan, menggunakan sistem informasi keuangan, dan menjalankan tugas administrasi secara profesional masih menjadi persoalan. Tidak semua aparatur memiliki kompetensi teknis yang memadai sehingga proses verifikasi, pelaporan, dan pengawasan sering memerlukan waktu lebih lama daripada ideal. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan anggaran dan meningkatkan risiko kesalahan administratif.

2. Kompleksitas Regulasi

Perubahan regulasi yang cepat seringkali menyulitkan aparatur dalam menyesuaikan prosedur. Kompleksitas aturan tata kelola fiskal membuat proses administrasi memerlukan ketelitian yang tinggi, dan dalam beberapa kasus dapat memperlambat proses penganggaran.

3. Birokrasi Berlapis

Temuan menunjukkan bahwa panjangnya rantai birokrasi sering menjadi hambatan utama bagi kelancaran proses anggaran. Setiap tahapan memerlukan verifikasi berlapis, yang meskipun penting untuk menjaga akuntabilitas, dapat mengurangi efisiensi waktu.

4. Keterbatasan Teknologi

Sistem informasi keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan sejumlah proses harus dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan potensi kesalahan dan memperlambat proses administrasi. Penguatan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Tantangan ini relevan dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai hubungan antara kualitas administrasi dan kemakmuran negara. Administrasi yang berat dan tidak efisien merupakan faktor yang dapat menurunkan efektivitas pemerintahan dan menghambat pembangunan daerah.

Analisis Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Analisis ekonomi Islam memberikan kerangka evaluatif yang penting untuk menilai sejauh mana tata kelola keuangan daerah sejalan dengan nilai moral dan etika Islam. Setidaknya ada tiga perspektif utama yang digunakan: maqasid al-shariah, hisbah, dan teori fiskal Ibn Khaldun (Aini & Abidin, 2022)

1. *Maqasid as-shariah*

Pengelolaan keuangan daerah harus menjamin tercapainya perlindungan harta publik (*hifz al-mal*), keadilan dalam distribusi manfaat, dan kemaslahatan umum. Peran sekretariat dalam memastikan tertibnya proses anggaran memberikan kontribusi penting dalam menjaga *hifz al-mal* sebagai nilai inti dalam maqasid (Khaldun, 2014).

2. Hisbah dan Etika Pengawasan

Hisbah menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan pencegahan penyimpangan. Mekanisme dokumentasi dan verifikasi sekretariat menjadi representasi modern dari nilai hisbah. Namun tantangan dalam akses informasi publik menunjukkan bahwa aspek transparansi perlu diperkuat agar akuntabilitas dapat meningkat.

3. Teori Fiskal Ibn Khaldun

Menurut Ibn Khaldun, birokrasi yang terlalu rumit dapat melemahkan kinerja fiskal dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian mengenai birokrasi berlapis dan kapasitas SDM yang terbatas menunjukkan masih adanya gap antara praktik lapangan dengan idealitas efisiensi menurut Ibn Khaldun. Secara umum, penerapan nilai ekonomi Islam dalam proses pengelolaan keuangan daerah masih memiliki ruang perbaikan, terutama terkait peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem administrasi, dan penguatan transparansi publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam tata kelola keuangan daerah dan bagaimana fungsi tersebut dapat dievaluasi melalui perspektif Ekonomi Pembangunan Islam. Sebagai unit administratif strategis, sekretariat berperan penting dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan publik—mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban—berjalan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan regulatif yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekretariat telah menjalankan sejumlah mekanisme administratif dengan baik, terutama dalam penyusunan dokumen anggaran, fasilitasi koordinasi kelembagaan, serta pengelolaan arsip keuangan sebagai dasar akuntabilitas fiskal.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan struktural dan operasional yang perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas tata kelola fiskal. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur,

kompleksitas regulasi, birokrasi berlapis yang menghambat efisiensi waktu, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi konsistensi, ketepatan waktu, dan akurasi dokumen keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan fiskal. Temuan ini selaras dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penguatan kapasitas teknis, dan digitalisasi administrasi sebagai fondasi utama tata kelola keuangan daerah yang modern dan efektif (Bashir, 2011; Handaka, 2018)

Dari perspektif Ekonomi Pembangunan Islam, pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika syariah. Melalui kerangka maqasid al-shariah, keuangan publik wajib dikelola untuk melindungi harta masyarakat (hifz al-mal), menciptakan keadilan fiskal, serta mengarahkan penggunaan anggaran pada pencapaian kemaslahatan umum. Prinsip hisbah menekankan perlunya transparansi, pengawasan yang efektif, serta pencegahan penyimpangan sebagai amanah pengelola anggaran. Pemikiran Ibn Khaldun mengenai hubungan antara efisiensi administrasi dan stabilitas negara semakin menegaskan bahwa penguatan birokrasi merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi fiskal daerah (Azhar et al., 2024)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan disiplin administrasi publik modern dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan alur birokrasi, penguatan sistem informasi keuangan, dan pelembagaan transparansi publik menjadi langkah utama dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, peran sekretariat tidak hanya menjadi administratif, tetapi juga turut berkontribusi pada terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Pasaribu et al., 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185–205.
- Al-Khatib, A., & Abdullah, M. (2023). Hisbah and contemporary public sector oversight: A critical reinterpretation. *Review of Islamic Economics*, 27(1), 45–62. <https://doi.org/10.52282/RIE.2023.27103>
- Asyari, A. (2017). *Menulis Artikel Hasil Penelitian*.
- Azhar, F. N., Sania, N. K., Ismail, M. M., & ... (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Periode Menengah. *Jurnal Ilmiah ...*, 1(3), 415–426.
- Bashir, A. (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Kajian Ekonomi*, 10(2), 135–169.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought.

- Daus, F., Ulhak, M. Z., Lorenza, D. L., & Muhammad, M. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 43–54.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Diana, A. (2021). *PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* (Vol. 3, Issue 2). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Handaka, R. D. (2018). Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.146>
- Khaldun, I. (2014). The Muqaddimah: An introduction to history. *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, 55–66.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nahlah, Awaluddin, M., K, A., Hamka, Markarma, R., & Muhdar, F. R. (2023). Konsep Dasar Metodologi Ekonomi Islam. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1).
- Pasaribu, R. L., Febiola, P., Putri, R. H., & Hidayat, F. (2024). Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 107–116.
- Putri, H. E. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Rahman, A., & Rosman, R. (2022). Institutional capacity and governance effectiveness in Muslim-majority public organizations. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(3), 112–129.
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan, E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. (2025). Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 1–18.
- Shanker, A., Siddiqui, T., & Bashashati, M. (2020). An invited commentary on “Liu Z, Ding Z, Guan X, Zhag Y, Wang X, Khan JS. Optimizing response in surgical systems during and after COVID-19 pandemic: Lessons from China and the UK–Perspective. *Int J Surg* 2020 May 4; 78: 156-159.” *International Journal of Surgery*, 79, 60–61.
- Syarifah, A., & Nabhan, F. (2022). Effect of Organizational Culture on Employee Performance of MSMEs With Creativity And Motivation as Mediation Variables. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 6(2), 177–188.
- Tanjung, M. R., Aulia, A. P., & Zahara, A. (2025). Konsep Kebijakan Moneter Prespektif Al-Marqizi. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 74–93.
- Uddin, M. A., Ali, M. H., & Masih, M. (2020). Institutions, human capital and economic growth in developing countries. *Studies in Economics and*

Finance, 38(2), 361–383. <https://doi.org/10.1108/SEF-10-2019-0407>

Copyright holder:

Susan Kurniati (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

